



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAMSU RIZAL KADAFI
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 235614

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 418.000.000

1. MOBIL, CEVROLET TRAILBLAZER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOTOR, KTM KD 39 MT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BG6-I A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 476.709.016

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.502.709.016

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.502.709.016

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DWI PANDJI FORKIANTORO**
2. Jabatan : **WAKIL CAMAT**
3. NHK : **259110**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 620.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/50 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 142.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, DAYHATSU AYLA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOBIL, NISSAN EVALIA XV Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. MOTOR, VESPA SUPER Tahun 1975, WARISAN Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 731.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.523.200.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.523.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMAD YOHAN**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**
3. NHK : **438008**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.395.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.395.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 87.600.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.600.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.451.560

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.484.051.560

III. HUTANG Rp. 1.844.986.416

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -360.934.856

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.